



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

PK 2023
Perjanjian Kinerja
SEKRETARIAT DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Motang Rua No. 1 Ruteng

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DRS. JAHANG FANSI ALDUS**

Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **HERYBERTUS G.L. NABIT, SE, MA**

Jabatan : **BUPATI MANGGARAI**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI MANGGARAI,

HERYBERTUS G.L. NABIT, SE, MA

Ruteng, 16 Januari 2023
Pihak Pertama
SEKRETARIS DAERAH,

DRS. JAHANG FANSI ALDUS
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650726 199011 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal B	Persen	58,54
		Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Kelembagaannya Efektif (Skor 61-80)	Persen	100,00
		Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai standar	Persen	100,00
		Persentase pelayanan terhadap KDH, Wakil KDH dan Sekretaris Daerah yang sesuai standar	Persen	100,00
2	Meningkatnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah	Nilai LPPD	Nilai	3.3151 (Sedang)
		Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100,00
		Persentase penyaluran bansos tepat sasaran	Persen	100,00
		Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan	Persen	100,00
		Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani	Persen	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00
		Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	Persen	70,00
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	60,00
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	40,00
		Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan	Persen	98,00
3	Meningkatnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal kategori baik	Persen	59,99

NO	PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.900.158.323,00	APBD
	Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.221.000,00	APBD
	Kegiatan Penataan Organisasi	318.142.000,00	APBD
	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	255.333.000,00	APBD
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	750.360.553,00	APBD
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.567.101.770,00	APBD
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.709.729.648,00	APBD
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	412.037.324,00	APBD
TOTAL		5.021.925.295,00	APBD



BUKTI MANGGARAI,

7 HERBERTUS G.L. NABIT, SE, MA

Ruteng, 16 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH,



DRS. JAHANG FANSI ALDUS
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650726 199011 1 001